

SKRIPSI
KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN KELUARGA SOLTHAN DI
KABUPATEN BANTAENG

Disusun dan diajukan oleh :

A. MUHAMMAD IYAN RASMAR

E 121 16 701



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN KELUARGA SOLTHAN
KABUPATEN BANTAENG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**A.MUH.IYAN RASMAR
E12116701**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi
Pada tanggal 02 Februari 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. Nurlina, M.Si
NIP. 19630921 1987 02 2 001

Pembimbing II



Rahmatullah, S.IP. M.Si
NIP. 19770513 2003 02 1 002

Mengetahui,

Sekretaris Departemen Ilmu Politik dan
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si
NIP.197901062005011001

LEMBARAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN KELUARGA SOLTHAN
KABUPATEN BANTAENG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**A.MUH IYAN RASMAR
E12116313**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari selasa, 02 Februari 2021

Menyetujui:

PANITIA UJIAN

Ketua	: Prof. Dr. H. Nurlina, M.Si	()
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	()
Anggota	: Prof. Djuanda Nawawi, M.Si	()
Anggota	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si	()
Pembimbing I	: Prof. Dr. Nurlina, M.Si	()
Pembimbing II	: Rahmatullah, S.ip, M.Si	()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : A.Muh Iyan Rasmar

Nomor Mahasiswa : E12116701

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Februari 2021



menyatakan,

A.Muh Iyan Rasmar

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “**KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN KELUARGA SOLTHAN KABUPATEN BANTAENG**” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah swt. sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yaitu Bapak Muh. Jafar dan Ibu Hartati atas segala bentuk pengorbanan baik secara lahir maupun batin dan telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis hingga sekarang.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik materiil maupun non-materiil. Sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu di kampus tercinta dan mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. H. Nurlina, M.Si selaku pembimbing 1 dan dosen (PA) yang senantiasa meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis dari awal penyusunan proposal hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rahmatullah, Si.P. M.Si, selaku Pembimbing 2 Penulis yang selalu membantu mengarahkan, membimbing dan memberikan nasehat dari awal penyusunan proposal hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada para dosen selaku tim penguji Prof. Djuanda Nawawi, M.Si dan Bapak A.Lukman S,ip, M.Si yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam proses penyusunan skripsi penulis.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis, Bapak Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, MA. (Alm.), Bapak Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si., Bapak Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si.(Alm.), Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si., Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si., Bapak Rahmatullah, S.IP., M.Si., Bapak A. Murfhi, S.Sos.(Alm.), M.Si. Bapak Haryanto, S.IP., M.A., Bapak Ashar Prawitno, S.IP., M.Si., dan Bapak Sunardi, S.IP., MAP., terima kasih atas didikan dan ilmu yang diberikan selama ini.
8. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kabupaten Bantaeng.
9. Terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat :
 - Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng
 - Bapak Bupati Bantaeng H. Ilham Azikin
 - Bapak Sultan Radja selaku tokoh masyarakat Kabupaten Bantaeng
 - Bapak H. Ibnu Mas'ud Sikki selaku tokoh masyarakat kabupaten bantaeng
 - Bapak Abd. Rauf selaku kepala desa parangloe tahun 2001-2011
 - Tokoh masyarakat dan masyarakat kabupaten Bantaeng

Yang telah memberikan bantuan kepada penulis mulai dari perizinan dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih Banyak Kepada Saudara Kandung penulis A.Sardi An As fari. Serta terima kasih kepada Adik saya tercinta A.Deswita Triandiryang selalu memberi semangat dan motivasi serta dukungan yang tak henti-hentinya. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat.

11. Terimakasih pula penulis sampaikan kepada sahabat sehidup, semati dan se-Surga saya Insyallah The Soulmate: Afdal Maulidin, Ismunandar, A.Fajar ferdianyah S.Sos, A.Tenri Wulandari Bakri, Yulad Samad Mustain, Haswil, Wahyu Nur alif Ramadhan, Dzul Fahri Mubarak, Fahri Indrawan, khaidir Aswat, Saddang, Wahyudi, Didi, Wahyu, Ikram, Akbar, Akib, Arban, Dwi, Ummu Aiman, Anggi NurWahyudi S.ip, Nurul Fajrianti, Miftahul Jannah, Nur afni Julianti, Rina, Septi, Serta Sahabat Pakboy Berbagi Berkah Dan Sahabat SOUND, yang selalu hadir dan menemani dikala susah maupun senang. Sahabat yang selalu memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis untuk menjalani proses hidup. Dan tak hentinya memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.

12. Terima kasih terkhusus kepada sahabat seperjuangan saya Ummu Aima, Yus Risal Bahkri dan Maslahatul Umma yang selalu menemani dan telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan bantuannya. Terima kasih untuk beberapa tahun yang sudah kita jalani bersama. Kebahagiaan, keceriaan dan kebersamaan ini semoga tetap hadir disetiap pertemuan-pertemuan berikutnya.
13. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan penulis Ilmu Pemerintahan 2016 (Verenigen) yang berjuang dari awal hingga akhir semoga kita semua bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi Nusa, Bangsa dan Agama.
14. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem), tempat penulis berproses mendewasakan diri.
15. Terima kasih kepada Teman-teman KKN SABINTANG (Adnan, Acci, Rahma, Gecewe, Aza) yang telah menjadi keluarga dan sahabat KKN saya yang selalu memotivasi dan memberi semangat kepada saya dalam menyelesaikan studi.
16. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar Alm.H.M Sawid T. (Alfatiha) dan Keluarga Besar Hj. Manikkang, sahabat serta seluruh teman-teman yang tidak sempat penulis tuliskan namanya satu-persatu, yang telah begitu banyak membantu dalam proses penyelesaian studi penulis.

17. Terima kasih kepada diri sendiri karena mampu bertahan dan menyelesaikan segala problematika yang terjadi pada diri sendiri. Tetap berbuat baik dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. InsyaAllah.

Makassar, 30 Januari 2021

Penulis,

ABSTRAK

A. Muhammad Iyan Rasmar (E12116701) “Kepemimpinan Pemerintahan Keluarga Solthan Di Kabupaten Bantaeng” di bawah bimbingan **Prof Dr. Nurlinah, M.Si**(Pembimbing 1) dan **Rahmatullah S.Ip, M.Si.** (Pembimbing 2)

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang digunakan Keluarga Solthan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten Bantaeng serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan keluarga Solthan menjadi bupati dalam penyelenggaraan pemilihan bupati di kabupaten Bantaeng..

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu memberikan gambaran serta penjelasan mengenai gaya kepemimpinan keluarga Solthan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Bantaeng dan faktor-faktor yang memengaruhi keterpilihan keluarga Solthan dalam pemilihan bupati di kabupaten Bantaeng. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data terkait tema penelitian yaitu dengan cara wawancara, observasi serta beberapa literatur yang terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian data yang telah diperoleh direduksi dan dipilih data yang sesuai dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan keluarga Solthan sebagai bupati di kabupaten Bantaeng adalah gaya kepemimpinan Demokratis, hal ini dapat dilihat dari indikator yang meliputi pemberian motivasi, dan pengambilan keputusan. Untuk faktor yang mempengaruhi keterpilihan keluarga Solthan menjadi bupati di kabupaten Bantaeng yaitu dengan memanfaatkan Modalitas yang dimiliki. Modalitas tersebut meliputi modal sosial, modal ekonomi, modal politik dan modal simbolik. Modal sosial yang dibangun mulai dari generasi pertama yaitu H. Solthan menjadi Bupati Bantaeng berefek sampai ke generasi ketiga yaitu H. Ilham Azikin yang juga menjadi Bupati di Bantaeng. Dari modal sosial yang dimiliki menimbulkan rembesan ke modal ekonomi, modal politik. dan juga modal simbolik berupa marga solthan yang menjadi salah satu kekuatan dalam meraih jabatan politik dan pemerintahan di Kabupaten Bantaeng sehingga modal simbolik tersebut digunakan dan dapat mem *Branding* setiap anggota Keluarga Solthan yang mengikuti kontestasi politik. Banyaknya Keluarga Solthan yang memiliki jabatan politik dan pemerintahan di Kabupaten Bantaeng menjadikan Keluarga Solthan termasuk kedalam keluarga politik dinasti sesuai dengan konsep politik dinasti.

Kata Kunci : Keluarga Solthan, Gaya Kepemimpinan, Demokratis, dan Politik

ABSTRACT

A. Muhammad Iyan Rasmar (E12116701) "Leadership of Solthan Family Government in Bantaeng Regency" under the guidance of Prof. Dr. Nurlinah, M.Si (Supervisor 1) and Rahmatullah S.Ip, M.Si. (Instructor 2)

This study aims to determine the leadership style used by the Solthan family in the implementation of regional government in Bantaeng district and to identify the factors that influence the choice of the Solthan family to become regents in organizing regent elections in Bantaeng district.

The research method used in this research is descriptive qualitative, which provides an overview and explanation of the leadership style of the Solthan family in government administration in Bantaeng district and the factors that influence the electability of the Solthan family in the election of the district head in Bantaeng district. Data collection techniques used in obtaining data related to the research theme, namely by means of interviews, observation and some literature related to the themes raised in this study. Then the data that has been obtained is reduced and the data is selected according to the research problem.

The results showed that the leadership style of the Solthan family as regents in Bantaeng district was a democratic leadership style, this can be seen from the indicators which include giving motivation and decision making. For factors that influence the choice of the Solthan family to become regents in Bantaeng district, namely by utilizing the modalities they have. These modalities include social capital, economic capital, political capital and symbolic capital. The social capital that was built from the first generation, namely H. Solthan to the Regent of Bantaeng, had an effect on to the third generation, namely H. Ilham Azikin who was also the Regent of Bantaeng. From the social capital owned, it creates seepage into economic capital, political capital. and also symbolic capital in the form of the Solthan clan which is one of the strengths in gaining political and governmental positions in Bantaeng Regency so that this symbolic capital is used and can branding every member of the Solthan Family who participates in political contestation. The large number of Solthan families who have political and governmental positions in Bantaeng Regency make the Solthan family included in the dynastic political family according to the concept of dynastic politics.

Keywords: Solthan Family, Leadership Style, Democratic, and Politics

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	x
ABSTRAC	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	6
I.3. Tujuan Penelitian	6
I.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
II.1. Pengertian Kepemimpinan	8
II.1.1. Pengertian Kepemimpinan Menurut Para Ahli	10
II.2. Teori Kepemimpinan	12
II.2.1.1. Teori Karakter	12
II.2.1.2. Teori Situsional	14
II.2.1.3. Teori Great Man dan Teori Big Bang	14
II.3. Pengertian Gaya Kepemimpinan	15
II.4. Teori Gaya Kepemimpinan.....	17
II.5. Indikator Gaya Kepemimpinan	18
II.6. Jenis-jenis Gaya Kepemimpinan.....	21
II.7. Modalitas Pemimpin	24

II.7.1. Modal Simbolik	24
II.7.2. Modal Ekonomi	25
II.7.3. Modal Sosial	28
II.7.4. Modal Politik	30
II.8 Personal Branding	32
II. Kerangka Konseptual	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
III.1. Lokasi Penelitian	38
III.2. Tipe dan Jenis Penelitian	38
III.2.1. Tipe Penelitian	38
III.2.2. Jenis Penelitian.....	39
III.3. Teknik Pengumpulan Data	40
III.4. Informan Penelitian	41
III.5. Fokus Penelitian.....	41
III.6. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV GAMBARAN LO/KASI PENELITIAN.....	44
IV.1 Sejarah Kabupaten Bantaeng	44
IV.2 Kondisi Pemerintahan Kabupaten Bantaeng	47
IV.2.1 Kondisi Pemerintahan	47
IV.3 Indeks Pembangunan Manusia	50
IV.4 Agama	51
IV.5 Sejarah Generasi Solthan Menjadi Bupati Bantaeng	52
IV.5.1 Generasi Pertama H. Solthan	52
IV.5.2 Generasi Kedua H. Azikin Solthan	54
IV.5.3 Generasi Ketiga H. Ilham Azikin Solthan	58
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN GAYA KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN KELUARGA SOLTHAN DI KABUPATEN BANTAEG.....	63
V.1 Gaya Demokratis.....	66
V.2 Faktor Yang Mempengaruhi Keterpilihan Keluarga Solthan Menjadi Bupati Di Kabupaten Bantaeng	83
BAB VI PENUTUP.....	122

V.1 Kesimpulan	122
V.2 Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi yang tinggi, dimana pemilu merupakan jantung dari demokrasi masyarakat bebas memilih siapa yang akan jadi pemimpinnya. Pemilu di Indonesia baru dimulai pada tahun 2004 dan telah melahirkan banyak pemimpin yang sukses. Sedikit demi sedikit pemilu di Indonesia berkembang mulai dari pemilihan Umum presiden, gubernur, dan walikota/bupati, serta bahkan pemilu sudah masuk ke desa dengan diadakannya pemilihan kepala desa.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki kepala daerah sebagai kepala pemerintahan. Kepala daerah Provinsi disebut Gubernur, kepala daerah Kabupaten disebut Bupati dan kepala daerah Kota disebut Walikota yang semuanya dipilih langsung oleh rakyat. Salah satu semangat dari pelaksanaan otonomi daerah di mana rakyat berpartisipasi dalam pelaksanaan kehidupan berdemokrasi.

Kepala pemerintahan dalam suatu daerah yang di sebut kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana yang dimaksud untuk provinsi di sebut gubernur, untuk kota di sebut walikota dan untuk kabupaten di sebut bupati. Berangkat dari hal tersebut maka untuk 3 menentukan kepala daerah dilakukan secara langsung di daerah masing-masing. siapa saja

memiliki hak untuk menjadi kepala daerah yang penting dapat memenuhi syarat yang telah di atur dalam undang-undang begitu juga terhadap masyarakat mereka berhak menentukan siapa yang dia inginkan menjadi kepala daerahnya. Siapapun yang terpilih untuk menjadi kepala daerah sudah seharusnya memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, agar supaya pemerintahan yang di piminnya bisa berjalan dengan baik pula dan sesuai dengan apa yang di inginkan masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, kepemimpinan secara ilmiah mulai berkembang bersamaan dengan pertumbuhan manajemen ilmiah yang lebih dikenal dengan ilmu tentang memimpin. Hal ini terlihat dari banyaknya literatur yang mengkaji tentang leadership dengan berbagai sudut pandang atau perspektifnya. Leadership tidak hanya dilihat dari bak saja, akan tetapi dapat dilihat dari penyiapan sesuatu secara berencana dan dapat melatih calon-calon pemimpin. Kepemimpinan merupakan proses atau serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lain berisi menggerakkan, membimbing dan mengarahkan sertamengawasi orang lain dalam berbuat sama. Seluruh kegiatan itu dapat disebut sebagai usaha mempengaruhi perasaan, pikiran dan tingkah laku orang lain ke arah pencapaian tujuan. Kepemimpinan juga bisa diartikan proses interaksi antara pemimpin dengan pegawainya untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan tujuan organisasi. Kepemimpinan pada suatu organisasi sangat ditentukan oleh bagaimana pimpinan mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat. Kartono

mengatakan bahwa persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu: (1) kekuasaan, yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu, (2) kelebihan, keunggulan keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh kepada pimpinan, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. (3) kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun anggota biasa¹.

Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu daerah di Indonesia yang dalam penerapan sistem otonomi daerah telah mendorong terjadinya dinamika kepemimpinan politik di kabupaten tersebut. Rakyat dalam sistem otonomi daerah berhak memilih pemimpin untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia saat ini memperlihatkan kenyataan bahwa setidaknya sejumlah pemimpin lokal telah membuktikan keberhasilan mengelola permasalahan kehidupan masyarakat yang terjadi pada daerahnya.

Dalam sejarah tatanan politik pemerintahan di Indonesia dikenal dengan adanya politik keluarga yang dimana ada sebuah keluarga yang mempunyai berbagai macam jabatan politik. Di skala lokal kita dapat melihat di Sulawesi-Selatan misalnya keluarga politik keluarga Syahrul Yasin Limpo, Syahrul Yasin Limpo telah menjabat sebagai Bupati

¹ Harbani Pasollong. 2013. Kepemimpinan Birokrasi. Alfabeta. Bandung. Hal

Kabupaten Gowa selama 2 periode dari tahun 1994-2002, kemudian dilanjutkan oleh saudara kandungnya yaitu Ichsan Yasin Limpo yang juga menjabat sebagai Bupati Kabupaten Gowa selama 2 periode dari tahun 2005-2015, dan sekarang dilanjutkan oleh anak Ichsan Yasin Limpo yaitu Adnan Purictha Ichsan sebagai Bupati Kabupaten Gowa periode 2015-2019.

Di skala lokal lainnya yang tengah ramai di bicarakan yaitu politik keluarga Ratu Atut ibu tiri Atut, Heryani jadi Wakil Bupati Pandeglang; adik Atut, Ratu Tatu Chasanah menjabat Wakil Bupati Serang; adik tiri Atut, TB. Haerul Jaman, Walikota Serang; adik ipar Atut, Airin Rachmy Diani Walikota Tangerang Selatan. Selain di eksekutif, keluarga Ratu Atut juga tersebar di legislatif mulai tingkat kabupaten sampai nasional. Suami Atut, Hikmat Tomet anggota DPR RI; anak Atut, Andika Hazrumy anggota DPD; menantu Atut, Ade Rossi Khaerunisa anggota DPRD Kota Serang; ibu tiri Atut, Ratna Komalasari DPRD Kota Serang. Aden Abdul Cholik adik ipar Atut menjadi anggota DPRD Provinsi Banten².

Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang mempunyai keluarga politik, yaitu keluarga Solthan. Keluarga solthan adalah keluarga yang banyak memegang jabatan penting dalam sejarah roda pemerintahan di Kabupaten Bantaeng. Eksistensi dan elektabilitas keluarga solthan dalam catatan sejarah perpolitikan masih tetap terjaga sampai sekarang, dibuktikan dengan terpilihnya Ilham Azikin

²<https://news.detik.com/berita/d-4121115/10-nama-di-dinasti-ratu-atut-anak-adik-hingga-mantu>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 14.36

Solthan sebagai Bupati Bantaeng periode 2018-2023 pada pilkada serentak tahun 2018 yang merupakan generasi ke 3 menjadi bupati bantaeng pada barisan keluarga solthan dalam memimpin Kabupaten Bantaeng.

Keluarga solthan sudah sangat dikenal oleh masyarakat Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan bahwa H. Solthan adalah salah satu keturunan dari Raja Bantaeng. Catatan pembentukan keluarga politik itu sendiri dimulai dari H. Solthan sebagai Bupati Kabupaten Bantaeng yang menjabat 2 periode yaitu tahun 1966-1978 generasi pertama, kemudian generasi kedua ke anaknya yaitu Azikin Solthan menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bantaeng yang menjabat 2 periode tahun 1998-2008, dan generasi ketiga yaitu Ilham Azikin Solthan merupakan anak dari Azikin Solthan kini Petahana sebagai Bupati Kabupaten Bantaeng terpilih pada pilkada serentak tahun 2018 periode 2018-2023. Tak hanya jabatan eksekutif sebagai kepala daerah, sejarah dalam jabatan lembaga legislatif keluarga solthan juga mempunyai eksistensi dalam lembaga tersebut. Dibuktikan dengan terpilihnya Azikin Solthan sebagai anggota DPR RI periode 2015-2019 dan kini kembali mencalonkan untuk periode ke 2 sebagai anggota DPR RI, Budi Solthan juga Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng periode 2014-2019, kini kembali mencalonkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bantaeng periode ke 2. Lembaga pemerintahan seperti kepala dinas pendidikan, kepala

dinas pariwisata pada tahun 2008 di pimpin oleh Ibrahim Solthan dan Syahlan Solthan yang merupakan saudara dari Azikin Solthan.

Setiap generasi Keluarga Solthan tentunya mempunyai strategi dan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantaeng. Keberhasilan Generasi pertama dan kedua keluarga solthan dalam memimpin kabupaten Bantaeng tentunya mendapatkan apresiasi yang sangat baik bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng. Meskipun dalam satu rumpun keluarga dan sedikit banyaknya belajar dari keluarga sendiri tiap orang pasti mempunyai gaya dan cara memimpin di masa jabatannya untuk memajukan daerah yang dipimpin.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul Penelitian sebagai berikut :

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana gaya kepemimpinan pemerintahan Keluarga Solthan Generasi Pertama Sampai Generasi keluarga solthan menjadi Bupati di Kabupaten Bantaeng ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi keterpilihan Generasi Pertama Sampai Generasi Ketiga Keluarga Solthan Menjadi Bupati di Kabupaten Bantaeng ?

I.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis gaya kepemimpinan Generasi Pertama sampai Generasi Ketiga Keluarga Solthan Menjadi Bupati di Kabupaten Bantaeng
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi keterpilihan Generasi Pertama sampai Generasi Ketiga Keluarga Solthan Menjadi Bupati di Kabupaten Bantaeng

1.4 Manfaat Penulisan

A. Manfaat Akademis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai hal yang dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dalam hal pemahaman mengenai budaya system pemerintahan yang terjadi di Indonesia sekarang yaitu dinasti politik pemerintahan.

B. Manfaat Praktis Penelitian ini mempunyai manfaat praktis yaitu sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan tema yang selalu menarik. Ia selalu memiliki corak dan warna tersendiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan situasi dan kondisi masanya. Kepemimpinan merupakan fenomena kemasyarakatan dan kebangsaan, yang berpengaruh terhadap perkembangan proses kenegaraan. Hal ini dikarenakan kepemimpinan menjadi salah satu fungsi yang dapat mendorong terwujudnya cita-cita, tujuan serta kepentingan nasional. Terminologi kepemimpinan muncul sebagai konsekuensi logis dari perilaku dan budaya manusia yang terlahir sebagai individu yang memiliki ketergantungan sosial begitu tinggi dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Di satu pihak, manusia terbatas kemampuannya untuk memimpin, di pihak lain ada orang yang mempunyai kelebihan kemampuan untuk memimpin. Disinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan gejala sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Model dan gaya kepemimpinan selalu melahirkan berbagai varian. Terbukti kepemimpinan politik bangsa ini, apa itu pada tingkat Daerah ataupun Nasional selalu berbeda antara satu dengan yang lain.

kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, dimana tujuannya adalah untuk mencapai target (goal) yang telah ditentukan (Kartono, 2008).

Pemimpin adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua (kepala) dalam sistem di sebuah organisasi/ perusahaan. Dengan begitu, maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memandu dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang (Kartono, 2008).

Secara umum, seorang pemimpin (leader) memiliki aura karismatik di dalam dirinya, memiliki visi misi yang jelas, mampu mengendalikan apa yang dipimpin, dan tentunya pandai dalam berkomunikasi. Namun, pemimpin yang paling efektif adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya memimpin dan beradaptasi dengan berbagai situasi.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kepemimpinan diartikan sebagai perihal pemimpin; cara memimpin. Sedangkan memimpin itu sendiri memiliki makna; 1. Mengetahui atau mengepalai; 2. Memenangkan paling banyak; 3. Memegang tangan seseorang sambil berjalan (untuk menuntun, menunjukkan jalan, dan sebagainya); 4. Memandu, membimbing; 5. Melatih (mendidik, mengajari, dan sebagainya) supaya dapat mengerjakan sendiri³

Pemimpin adalah individu manusianya, sementara kepemimpinan adalah sifat yang melekat kepadanya sebagai pemimpin, oleh sebab itu

³Pusat Bahasa, Kamus Besar, Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 2007)

Kepemimpinan merupakan suatu yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi pemimpin. Secara umum kepemimpinan dapat diartikan sebagai dasar kemampuan atau bakat, serta kelebihan seseorang untuk memimpin bawahan, kelompok dan masyarakatnya. Dengan kemampuan, dan bakat, serta kelebihan-kelebihan lainnya dari seorang pemimpin tersebut diharapkan dapat mempengaruhi dan mengendalikan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bersama.

2.1.1. Pengertian Kepemimpinan Menurut Para Ahli

Dalam berbagai aspek, memahami pengertian kepemimpinan dalam organisasi menjadi sesuatu yang krusial. Beberapa ahli, menjelaskan mengenai definisi kepemimpinan, diantaranya adalah:

1. Wahjosumidjo

Menurut Wahjosumidjo, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan yang ada pada diri seorang leader yang berupa sifat-sifat tertentu, seperti:

- a. Kepribadian (personality)
- b. Kemampuan (ability)
- c. Kesanggupan (capability)

Kepemimpinan merupakan rangkaian aktivitas pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, gaya dan perilaku pemimpin tersebut, serta interaksi antara pemimpin, pengikut dan situasi

2. Sutarto Wijono

Menurut Sutarto, arti kepemimpinan adalah rangkaian aktivitas penataan berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. S. P. Siagian

Menurut S. P. Siagian, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menjabat sebagai pimpinan dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain, khususnya bawahannya agar berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Imam Moejiono

Menurut Imam Moedjiono, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan dalam memberikan pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki beberapa kualitas tertentu yang membuatnya berbeda dengan pengikutnya.

5. George R. Terry

Menurut George R. Terry, pengertian leadership adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk diarahkan mewujudkan tujuan organisasi.

6. James A.F. Stoner

Menurut Stoner, pengertian leadership adalah sebuah proses mengarahkan dan usaha dalam mempengaruhi kegiatan yang berkaitan dengan anggota kelompok atau organisasi.

7. Jacobs dan Jacques

Menurut Jacobs dan Jacques arti kepemimpinan adalah suatu proses memberi arti terhadap usaha kolektif, sehingga ada kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai tujuan.

8. Hemhiel dan Coons

Menurut Hemhiel dan Coons, pengertian kepemimpinan adalah perilaku seseorang individu dalam memimpin berbagai aktivitas sebuah organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama (shared goal).

9. Ralph M. Stogdill

Menurut Ralph M. Stogdill, defenisi kepemimpinan adalah suatu proses memberikan pengaruh terhadap berbagai kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai target.

10. Charles F. Rauch dan Orlando Behling

Menurut Rauch dan Behling, arti kepemimpinan adalah proses mempengaruhi berbagai aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan.

11. Kenneth N. Wexley dan Gary Yukl

Menurut Wexley dan Yukl, pengertian kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk lebih berupaya dalam mengarahkan tenaga dalam tugasnya, atau mengubah perilaku mereka.

2.2 Teori Kepemimpinan

2.2.1 Teori Karakter

Teori Karakter Adalah suatu teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik atau sifat-sifat yang khas yang dihubungkan dengan keberhasilan seorang pemimpin. Karakteristik yang dapat diperhatikan seperti intelegensia, kepribadian, karakter fisik, kemampuan pengawasan dan sebagainya. Intelegensia, seorang pemimpin lebih cerdas dari pengikut. Namun perbedaan intelegensia dapat menimbulkan masalah antara pemimpin dan pengikut. Kelebihan kecerdasan pemimpin mampu membuat kepemimpinan lebih efektif. Kepribadian, seorang pemimpin memiliki sifat siaga, integritas pribadi, percaya diri, dan penuh inisiatif. Pada prinsipnya ada kepribadian tertentu yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin.

Karakteristik fisik, seorang pemimpin dapat terlihat dari karakteristik fisik. Dengan pengertian lain menganggap sifat-sifat fisik membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin (penampilan). Akan tetapi anggapan ini menimbulkan diskusi yang cukup tajam. Kenyataan banyak menunjukkan sulit melihat efektifitas pemimpin dari penampilan fisik. Kemampuan pengawasan. Ghiselli (dalam Rasimin, 2004) menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat pengawasan dengan tingkat hirarki. Krikpatrick dan Locke menambahkan bahwa pemimpin tidak harus memiliki intelegensi yang tinggi akan tetapi harus memiliki "hal-hal yang tepat atau karakter/sifat untuk menjadi efektif. Adapun hal lain yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin adalah : ambisi dan energi, hasrat untuk memimpin, kejujuran,

kepercayaan diri, sosiabilitas, pengetahuan dan stabilitas emosi. Alasan teori ciri kurang tepat di dalam menerangkan efektifitas kepemimpinan. Karena mengabaikan pengikut, kurang mampu menjelaskan pentingnya ciri, dan mengabaikan faktor situasional.

2.2.2 Teori Situasional (Situational Leadership Theory)

Teori kepemimpinan situasional, dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard. Teori ini berusaha memberikan pemahaman kepada pemimpin tentang kaitan antara gaya kepemimpinan yang efektif dengan tingkat kematangan dari para pengikutnya. Hersey dan Blanchard berpendapat bahwa bawahan merupakan faktor yang sangat penting dalam situasi kepemimpinan. Tingkat kematangan dari para bawahan menentukan gaya efektif dari pemimpin.

Dengan demikian konsep dari teori kepemimpinan situasional menekankan bahwa seorang pemimpin hendaknya menganalisa secara cermat tingkat kematangan anggota di dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya anggota yang sudah bisa memotivasi dirinya sendiri akan sangat sesuai bila ia dipimpin dengan cara delegasi. Artinya ia dipercaya penuh mengerjakan tugas-tugasnya secara mandiri tanpa perlu adanya pengawasan melekat. Jadi dalam hal ini pemimpinlah yang harus menyesuaikan dirinya dengan tuntutan situasi.

2.2.3 Teori Great Man dan Teori Big Bang

Dalam teori Great Man dan Big Bang, suatu kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan yang sudah muncul sejak seseorang

dilahirkan ke dunia. Bennis & Nanus (1990) menjelaskan bahwa teori ini berasumsi pemimpin bukan diciptakan, tetapi melainkan dilahirkan. Kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu, yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Suatu peristiwa besar bisa menciptakan seseorang menjadi pemimpin. Seorang pemimpin mampu mengintegrasikan antara situasi dan pengikut. Dan situasi merupakan peristiwa besar seperti revolusi, kekacauan/kerusuhan, pemberontakan, reformasi dll. Dalam hal ini, pengikut adalah orang yang menokohkan seseorang dan bersedia patuh dan taat.

2.3 Pengertian Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah suatu cara, pola dan kemampuan tertentu yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam bersikap, berkomunikasi dan berinteraksi untuk mempengaruhi, mengarahkan, mendorong dan mengendalikan orang lain atau bawahan agar bisa melakukan suatu pekerjaan sehingga mencapai suatu tujuan.

Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lainnya, dan bukan suatu keharusan bahwa suatu gaya kepemimpinan lebih baik atau lebih buruk dibanding gaya kepemimpinan lainnya.

Gaya kepemimpinan menunjukkan secara langsung maupun tidak langsung, mengenai keyakinan seorang pemimpin terhadap kemampuan bawahannya. Artinya gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi,

sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin saat mencoba untuk memengaruhi kinerja bawahannya.

Berikut definisi dan pengertian kepemimpinan menurut para ahli dari beberapa sumber buku:

1. Menurut Kartono (2008), gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, tempramen, watak dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain.
2. Menurut Supardo (2006), gaya kepemimpinan adalah suatu cara dan proses kompleks dimana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas atau suatu sasaran dan mengarahkan organisasi dengan cara yang lebih masuk akal.
3. Menurut Rivai (2014), gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin.
4. Menurut Hasibuan (2013), gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.
5. Menurut Thoha (2010), gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan.

2.4 Teori Gaya Kepemimpinan

Menurut Istijanto (2006), gaya kepemimpinan seseorang umumnya berdasarkan dua pertimbangan, yaitu:

1. Kepemimpinan atas dasar struktur. Kepemimpinan yang menekankan struktur tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan dimana meliputi tugas pokok, fungsi, tanggung jawab, prestasi kerja dan ide (gagasan).
2. Kepemimpinan berdasarkan pertimbangan. Kepemimpinan yang menekankan gaya kepemimpinan yang memberikan perhatian atas dukungan terhadap bawahan dimana meliputi peraturan, hubungan kerja dan etika.

Sedangkan menurut Purnomo dan Wijayanti (2013), gaya kepemimpinan bersumber dari beberapa teori, yaitu:

1. Teori Bakat (traits). Teori yang mencari karakter atau kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual yang membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Bakat (traits) di-definisikan sebagai kecenderungan yang dapat diduga, yang mengarahkan perilaku individu berbuat dengan cara yang konsisten dan khas.
2. Teori Perilaku. Teori perilaku kepemimpinan, yaitu teori-teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Kebanyakan perilaku kepemimpinan yang digambarkan oleh bawahan sebagai struktur prakarsa (initiating structure) dan pertimbangan (consideration), yaitu mempertimbangkan perasaan dan kesejahteraan para bawahan.

3. Teori Situasional. Gaya situasional yang dikaitkan dengan tugas dan hubungan. Yang dimaksud dengan gaya situasional dikaitkan dengan tugas dan hubungan, yaitu bahwa seorang manajer atau pemimpin akan menggunakan gaya tertentu, tergantung pada apa yang menonjol, tugas atau hubungan.

2.5 Indikator Gaya Kepemimpinan

Menurut Kartono (2008), gaya kepemimpinan seseorang dapat dilihat dan dinilai dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kemampuan Mengambil Keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Pada dasarnya pengambilan keputusan adalah merupakan tahap-tahap yang harus dilakukan atau digunakan untuk membuat keputusan. Begitu pula dalam tatanan pemerintahan daerah, bupati atau kepala daerah dituntut untuk mampu mengambil keputusan yang baik dalam segala hal yang dihadapinya, baik untuk sebuah masalah atau sebuah kebijakan. Adapun juga dasar-dasar pengambilan keputusan Menurut Harbani Pasolong (2013). Diantaranya :

1. Insting, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan dengan berdasarkan atas insting yang bersifat subjektif, sehingga mudah terkena oleh beberapa pengaruh.
2. Pengalaman, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan dengan berdasarkan pada pengalaman. Karena pengalaman seseorang

dapat memprediksi keadaan sesuatu berdasarkan pengalaman yang telah dialami.

3. Fakta, yaitu pengambilan keputusan yang didasarkan pada fakta. Keputusan yang didasarkan pada fakta dapat melahirkan keputusan yang baik, karena dengan fakta maka tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi.
4. Wewenang, yaitu pengambilan keputusan yang didasarkan pada wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi jabatannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya.
5. Rasional, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan rasionalitas. Keputusan yang bersifat objektif dan logis sehingga dapat dikatakan keputusan yang dihasilkan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Kemampuan Memotivasi. Kemampuan Memotivasi adalah Daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuannya (dalam bentuk keahlian atau keterampilan) tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya, Memotivasi merupakan tugas pimpinan dalam hal ini adalah Kepala Daerah, tujuannya agar

semua staf bawahannya dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan tujuan dapat tercapai. Lebih lanjut Ambar teguh mengemukakan tujuan pemimpin untuk memberi motivasi, antara lain:

- a. Mengusahakan agar tujuan yang telah ditetapkan sesuai apa yang ada di dalam diri seseorang.
- b. Meengusahakan agar perbuatan atau tindakan yang diharapkan untuk dilakukan tersebut sama dengan kemampuan seseorang.
- c. Jika tujuan organisasi tidak sama dengan apa yang ada dalam motif seseorang maka pimpinan akan sulit untuk memotivasi .
- d. Jika perbuatan, tindakan yang harus dilakukan tidak didukung oleh kemampuan yang sebanding maka pimpinan akan sulit memotivasi.

3. Kemampuan Komunikasi. Kemampuan Komunikasi Adalah kecakapan atau kesanggupan penyampaian pesan, gagasan, atau pikiran kepada orang lain dengan tujuan orang lain tersebut memahami apa yang dimaksudkan dengan baik, secara langsung lisan atau tidak langsung.

4. Kemampuan Mengendalikan Bawahan. Seorang Pemimpin harus memiliki keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk di dalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam.

5. Tanggung Jawab. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab kepada bawahannya. Tanggung jawab bisa diartikan sebagai kewajiban yang wajib menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

6. Kemampuan Mengendalikan Emosional. Kemampuan Mengendalikan Emosional adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan hidup kita. Semakin baik kemampuan kita mengendalikan emosi semakin mudah kita akan meraih kebahagiaan.

2.6 Jenis-jenis Gaya Kepemimpinan

Menurut Hasibuan (2013), terdapat beberapa macam gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Otoriter

Kepemimpinan Otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang, sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau kalau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Kepemimpinan Partisipasi

Kepemimpinan Partisipasi adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerja sama yang serasi, menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi para bawahan. Pemimpin memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki perusahaan. Bawahan

harus berpartisipasi memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

3. Kepemimpinan Delegasi

Kepemimpinan Delegasi apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan dengan agak lengkap. Dengan demikian, bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya. Pemimpin tidak peduli cara bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan pekerjaannya, sepenuhnya diserahkan kepada bawahan.

Sedangkan menurut Sutikno (2014), gaya kepemimpinan terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu:

1. Tipe Otokratik

Tipe kepemimpinan menganggap bahwa kepemimpinan adalah hak pribadinya (pemimpin), sehingga ia tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dan tidak boleh ada orang lain yang turut campur. Seorang pemimpin otokratik akan menunjukkan sikap yang menonjolkan keakuannya, dan selalu mengabaikan peranan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, tidak mau menerima saran dan pandangan bawahannya.

2. Tipe Kendali Bebas atau Masa Bodo (Laissez Faire)

Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otokratik. Dalam kepemimpinan tipe ini sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindar diri dari

tanggung jawab. Seorang pemimpin yang kendali bebas cenderung memilih peran yang pasif dan membiarkan organisasi berjalan menurut temponya sendiri. Disini seorang pemimpin mempunyai keyakinan bebas dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan maka semua usahanya akan cepat berhasil.

3. Tipe Paternalistik

Persepsi seorang pemimpin yang paternalistik tentang peranannya dalam kehidupan organisasi dapat dikatakan diwarnai oleh harapan bawahan kepadanya. Harapan bawahan berwujud keinginan agar pemimpin mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan layak dijadikan sebagai tempat bertanya dan untuk memperoleh petunjuk, memberikan perhatian terhadap kepentingan dan kesejahteraan bawahannya.

4. Tipe Kharismatik

Seorang pemimpin yang kharismatik memiliki karakteristik khusus yaitu daya tariknya yang sangat memikat, sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkrit mengapa orang tersebut itu dikagumi.

5. Tipe Militeristik

Pemimpin yang bertipe militeristik ialah pemimpin dalam menggerakkan bawahannya lebih sering mempergunakan sistem perintah, senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya, dan senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya, dan sukar menerima kritikan dari bawahannya.

6. Tipe Pseudo-demokratik

Tipe ini disebut juga kepemimpinan manipulatif atau semi demokratik. Pemimpin seperti ini menjadikan demokrasi sebagai selubung untuk memperoleh kemenangan tertentu. Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratik hanya tampaknya saja bersikap demokratis padahal sebenarnya dia bersikap otoriter. Pemimpin ini menganut demokrasi semu dan lebih mengarah kepada kegiatan pemimpin yang otoriter dalam bentuk yang halus dan samar-samar.

7. Tipe Demokratik

Tipe demokratik adalah tipe pemimpin yang demokratis, dan bukan karena dipilihnya si pemimpin secara demokratis. Tipe kepemimpinan dimana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, dan nasihat dari staf dan bawahan, melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Kepemimpinan demokratik adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab.

2.7 Modalitas Pemimpin

2.7.1 Modal Simbolik

Modal simbolik adalah jenis sumber daya yang dioptimalkan dalam meraih kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik sering membutuhkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor, prestise, gelar, status tinggi, dan keluarga ternama. Artinya modal simbolik di sini dimaksudkan sebagai semua bentuk pengakuan oleh kelompok, baik

secara institusional atau non-institusional. Simbol itu sendiri memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas, yang mampu menggiring orang untuk mempercayai, mengakui dan mengubah pandangan mereka tentang realitas seseorang, sekelompok orang, sebuah partai politik, atau sebuah bangsa.

Modal simbolik mengacu pada derajat akumulasi prestise, ketersohoran, konsekrasi atau kehormatan, dan dibangun di atas dialektika pengetahuan (*connaissance*) dan pengenalan (*reconnaissance*). Modal simbolik tidak lepas dari kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi, berkat akibat khusus suatu mobilisasi. Modal simbolik bisa berupa kantor yang luas di daerah mahal, mobil dengan sopirnya, namun bisa juga petunjuk-petunjuk yang tidak mencolok mata yang menunjukkan status tinggi pemiliknya. Misalnya, gelar pendidikan yang dicantumkan di kartu nama, cara bagaimana membuat tamu menanti, cara mengafirmasi otoritasnya⁴.

Meskipun memiliki peran penting dalam praktik, modal-modal tersebut tidak otomatis memiliki kekuatan signifikan di dalam suatu ranah. Setiap ranah memiliki kebutuhan modal spesifik yang berbeda dengan kebutuhan ranah lain. Kekuatan modal ekonomi seseorang dalam ranah kekuasaan boleh jadi efektif memampukannya bertarung, namun dalam ranah sastra, yang pertaruhannya ada pada legitimasi, yang dibutuhkan

⁴⁴ Haryatmoko, "Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu: Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa", *Jurnal/ Majalah BASIS*, No. 11-12 (November-Desember 2003), 43-45

lebih pada modal kultural serta modal simbolik. Bourdieu mengilustrasikan perbedaan jenis modal yang signifikan.

2.7.2 Modal Ekonomi

Pengertian modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda yang memiliki nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang/mata uang. Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa barang atau uang/jasa politik.

Menurut Bourdieu, bahwa Modal ekonomi dalam hal ini dilihat dari berbagai aspek yang dimiliki oleh calon kepala daerah pada saat Pilkada, di antaranya harta kekayaan pribadi dan dana sumbangan kampanye, tidak heran jika modal ini menjadi salah satu ukuran penting di dalam memenangkan sebuah kompetisi di dalam Pilkada. Sesuai dengan konsep modal ekonomi⁵.

Dalam konteks Pilkada atau Pileg modal ekonomi memiliki peran penting sebagai penggerak dan pelumas” mesin politik yang dipakai. Saat musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak spanduk, membayar iklan, konsultan politik dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya.

⁵Bourdieu, Pierre. 1986. “The Forms of Capital.” dalam Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. J. Richardson (Ed.). New York: Greenwood.

Modal politik dan ekonomi saling berkaitan dalam iklim politik yang menekankan kepada interaksi spontan (jarak waktu komunikasi yang pendek) antara pemilih dan calon politik. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku calon politisi mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalur pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang masih dalam proses transisi menuju pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional.

Para ekonom telah lama berbicara mengenai modal (capital) ini, khususnya modal ekonomi atau finansial (financial capital). Modal financial adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat-alat produksi perusahaan (misalnya pabrik, mesin, alat kantor, kendaraan) atau sejumlah uang yang dapat dikumpul atau ditabung untuk investasi di masa depan. Konsep modal seperti ini relatif mudah dipahami oleh orang awam sekalipun, karena membelanjakan atau menginvestasikan uang merupakan bagian kehidupan sehari-hari manusia dan melibatkan pemikiran yang jelas. Modal financial juga mudah untuk diukur. Uang dapat dihitung, karena jumlah uang yang dibelanjakan dapat diidentifikasi dengan barang yang dibeli.

Kandidat memerlukan dukungan ekonomi selain dari kandidat juga berasal dari aktor-aktor ekonomi untuk kemenangan pilkada dalam pembiayaan semua kegiatan politik kandidat. Menurut Sahdan dan Haboddin bahwa Proses politik pilkada membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal. Hal ini menyebabkan tantangan bagi proses perkembangan

demokrasi lokal, karena kandidat yang bertarung adalah para pemilik uang/modal yang besar. Modal Ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumbernya dari dana pribadi dan donatur, dan berdasarkan penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye dan beli suara, untuk pemenangan pilkada.

2.7.3 Modal Sosial

Modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohan sehingga adanya kepercayaan (trust) dari masyarakat menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung. Modal sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan Modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan.

Latar belakang sosial yang dimiliki aktor bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan Modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan. Kepercayaan di gunakan untuk memperoleh kedudukan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya atas dasar kepercayaan masyarakat. Jika

kekuasaan dilanggar, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada pemegang kekuasaan. Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan kemenangan seorang aktor dalam kontetasi politik, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut.

Pierre Bourdieu (1970), mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain : keanggotaan dalam kelompok sosial) yang menmberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif”. Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk sosial capital (modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu.

Modal sosial merujuk kepada jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. John F. Halliweel dalam bukunya *Social Capital and Prosocial Behaviour Sources of Well-Being* (2001:47) mengkaji klaim-klaim empirik tentang pentingnya modal sosial diantaranya: pertama, modal sosial selalu penting untuk pengembangan kapital manusia. Kedua,

modal sosial dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan memberi kebahagiaan yang subyektif. Ketiga, modal sosial juga juga dianggap penting peranannya guna meminimalisir ongkos dan resiko yang mungkin dikeluarkan dalam kegiatan ekonomi. Keempat, modal sosial dapat menggerakkan individu atau kelompok untuk melakukan mobilitas sosial secara vertikal.

2.7.4 Modal Politik

J.A Booth dan P.B Richard mengartikan modal politik sebagai aktivitas warga Negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi. A. Hick dan J. Misra mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya modal politik adalah kekuasaan yang di miliki seseorang, yang kemudian bisa di operasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum⁶.

Modal politik yaitu berupa dukungan dari partai politik (koalisi partai) dan dukungan elit-elit politik lokal dari organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan untuk pemenangan pilkada. Dalam konteks politik lokal (daerah) banyak terdapat elit-elit yang menduduki jabatan politik dan jabatan-jabatan strategis yang mempunyai peran penting dan pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat di daerah tersebut. Selain dukungan partai politik, kandidat juga memerlukan dukungan elit-elit politik

⁶Hick dan J. Misra.1993 dalam Gita Pratiwi Effendi.2018.*Modal Sosial, Ekonomi, Dan Politik Terpilihnya Chununia Chalim Sebagai Bupati Perempuan Di Lampung Timur Tahun 2015*

lokal dan elit politik tersebut memiliki peran yang menonjol dalam politik dan bidang lain serta memiliki pengaruh yang besar dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki calon kepala daerah. Kandidat juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan di partai politik dengan melihat posisi strategis dalam struktur jabatan di partai politik dan pemerintahan.

Kandidat memerlukan selain dukungan partai politik, juga dukungan elit-elit politik lokal dan elit politik tersebut memiliki peran yang menonjol dalam politik dan bidang lain serta memiliki pengaruh yang besar dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki calon kepala daerah, dan kandidat juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan di partai politik dengan melihat posisi strategis dalam struktur jabatan di partai politik dan pemerintahan⁷.

Casey sebagaimana dikutip Sudirman Nasir mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik antara modal politik dan modal simbolik, menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan. Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik. Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam

⁷Nurhasim, Moch, dkk(2003), Konflik antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Jakarta, hal 8.

sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (public opinion) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu⁸

2.8 Personal Branding

Personal branding adalah suatu proses ketika orang menggunakan dirinya atau karirnya sebagai merek (brand). Setiap orang memiliki *brand*. Personal branding tidak hanya untuk selebriti. Personal branding adalah bagaimana kita memasarkan diri pada orang lain secara sistematis. Karena itu sebagai brand, perlu ada strategi sehingga mereknya dikenal seperti yang diharapkan.

Seorang aktor dalam membangun kelompok dinasti, perlu penggalian mengenai sesuatu yang bernilai tentang dirinya, sehingga ketika dipublikasikan ada informasi yang layak disampaikan. Orang yang mengelola personal branding dengan baik, cenderung mendapat popularitas sesuai atau mendekati harapannya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara layaknya strategi pemasaran membangun ekuitas merek.

Personal Branding merupakan seni untuk menarik dan menjaga persepsi public secara aktif. Personal branding dapat dibangun dari orang,

⁸Casey, Kimberly. 2006, (Defining Political Capital; a Reconsideration of Bourdieus Interconvertibility Theory) seperti dikutip Sudirman Nasir (2009)

nama, tanda, simbol, atau desain yang dapat dijadikan pembeda dengan competitor. Tujuan personal branding adalah agar masyarakat luas semakin mengenal kandidat, menampilkan keunggulan kompetitif disbanding kandidat lain (pembeda), menciptakan citra yang diinginkan kandidat dalam benak pemilih, serta menunjukkan konsistensi kandidat dalam suatu bidang⁹.

Menurut Timothy P.P brined Personal brand adalah identitas pribadi mengenai kualitas dan nilai yang dimiliki oleh seseorang yang dapat menciptakan respon emosional terhadap orang lain. Personal brand merupakan gambaran kemampuan, keunggulan dan reputasi seseorang, yang mana mampu memperlihatkan keistimewaan dan keunggulan seseorang dalam bidang tertentu¹⁰.

Menurut Montoya ada delapan konsep pembentukan Personal Branding. Delapan konsep tersebut adalah pondasi dari personal branding yang kuat yaitu :

- a) Spesialisasi (The Law of Spezialitation), Personal branding yang hebat mempunyai ciri khas berupa ketepatan pada spesialisasi, fokus pada sebuah kekuatan, keahlian ataupun pencapaian tertentu.
- b) Kepemimpinan (The Law of Leadership), Personal branding yang dilengkapi dengan kekuasaan dan kredibilitas mampu memposisikan

⁹Wasase, Silih Agung.2011.*Political Branding and Public Relation*.PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta hlm 67

¹⁰Haroen, Dewi.2014.*Personal Branding*. Kunci kesuksesan berkiprah didunia politik : Jakarta hlm 54

seseorang sebagai pemimpin yang dapat memutuskan sesuatu dalam kondisi ketidakpastian dan memberikan arahan yang jelas

- c) Kepribadian (The Law of Personality), sosok kepribadian yang apa adanya dan hadir dengan ketidaksempurnaan menjadi dasar personal brand yang hebat konsep ini menghapuskan beberapa tekanan pada konsep kepemimpinan. Seseorang harus memiliki kepribadian yang baik, namun tidak harus sempurna.
- d) Perbedaan (The Law of Distinctiveness), personal brand yang efektif harus ditampilkan dengan cara yang berbeda dari yang lainnya. Diferensiasi diperlukan supaya membedakan antara satu dengan lainnya. Selain itu, dengan perbedaan seseorang akan lebih dikenal oleh khalayak.
- e) Terlihat (The Law of Visibility), personal brand harus dilihat secara konsisten dan terus-menerus sampai personal brand seseorang dikenal. Maka visibility lebih penting dan ability. Supaya visible, seseorang perlu mempromosikan dirinya menggunakan setiap kesempatan untuk membuat dirinya terlihat.
- f) Kesatuan (The Law of Unity), kehidupan pribadi yang berada dibalik personal brand harus sejalan dengan etika moral dan sikap yang telah ditentukan dari brand tersebut. Kehidupan pribadi selayaknya menjadi cerminan dari citra yang diinginkan dalam personal brand.
- g) Keteguhan (The Law of Persistence), personal brand tidak bias terjadi secara instan, ia membutuhkan waktu untuk tumbuh. Selama proses

tersebut berjalan, penting untuk selalu memperhatikan tiap tahapan dan trend yang terjadi

Nama baik (The Law of goodwill), sebuah personal brand akan memberikan hasil yang lebih baik dan bertahan lebih lama, jika seseorang dibelakangnya dipersepsikan dengan citra yang positif. Seseorang tersebut harus diasosiasikan dengan sebuah nilai atau ide yang diakui secara umum positif dan bermanfaat

2.9 Kerangka Konseptual

Kepemimpinan membahas tentang kualitas sumber daya manusia yang dimiliki bangsa ini. Kepemimpinan dalam pemerintahan merupakan aspek yang terus menerus dapat dikaji sejalan dengan kualitas dan kemampuan seorang pemimpin yang terus berkembang di Indonesia dalam memimpin hal apapun. Kepemimpinan suatu kepala daerah adalah cerminan kesuksesan pengolahan daerah, seorang kepala daerah dipastikan mempunyai keunggulan yang ada didalam dirinya sehingga dapat dipilih oleh masyarakat untuk memimpin.

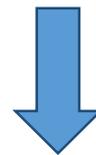
Pilkada serentak kembali di gelar di tahun 2018, salah satu peserta pilkada serentak tersebut yaitu Kabupaten Bantaeng. Pemenang pilkada di Kabupaten Bantaeng yaitu H. Ilham Azikin. H. Ilham Azikin merupakan generasi ketiga Keluarga Solthan yang menjadi Bupati di Kabupaten Bantaeng. Sebelum itu generasi pertama keluarga solthan yaitu H. Solthan yang menjadi Bupati di Kabupaten Bantaeng tahun periode 1968-2008 kemudian generasi kedua yaitu H. Azikin Solthan menjabat sebagai

Bupati Bantaeng pada tahun periode 1998-2008. Tentu saja Keluarga Solthan mempunyai daya Tarik dan kualitas yang mumpuni sehingga terus di percayakan oleh masyarakat untuk memimpin Kabupaten Bantaeng.

Kepemimpinan Pemerintahan Keluarga Solthan di Kabupaten Bantaeng

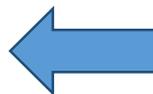


Keluarga Solthan adalah keluarga politik di Kabupaten Bantaeng. Catatan perjalanan politiknya di mulai dari H.Solthan yang terpilih menjadi Bupati Bantaeng tahun 1966-1978 kemudian H. Azikin Solthan yang menjadi Bupati Bantaeng Tahun 1998-2008 dan sekarang yang tengah menjabat sebagai Bupati Bantaeng tahun 2018-2023 yaitu H. Ilham Azikin. Dalam memimpin roda pemerintahan di Kabupaten Bantaeng tentunya masing-masing generasi memiliki gaya kepemimpinan tersendiri, sekalipun ilmu dari tiap generasi di turunkan ke generasi lainnya akan tetapi pembeda cara memimpin pemerintahan Kabupaten Bantaeng. Tidak hanya gaya kepemimpinan, modalitas tiap generasi sebagai pemimpin juga pasti ada dan berbeda, begitu pula dengan personal branding dari masing-masing generasi.



Gaya Kepemimpinan Keluarga Solthan

- H. Solthan : Demokratis
- H. Azikin Solthan : Demokratis
- H. Ilham Azikin : Demokratis



Faktor Keterpilihan Keluarga Solthan Menjadi Bupati di Kabupaten Bantaeng yaitu karena memiliki :

- Modal Sosial
- Modal Politik
- Modal Ekonomi
- Modal Simbolik
- Personal Branding